

PENDIDIKAN DAMAI SEBAGAI PEMBINAAN KEADABAN KEWARGANEGARAAN DI BIDANG SOSIAL

Zuhri Zurgobban, Dasim Budimansyah,

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Email: budimansyah@upi.edu

Abstract: This research aims to describe the impact of peace education program carried out by Peace Generation community as an attempt to develop the civic virtue in the social field. Research method used is a case study with qualitative approach. The research subject are including community administrator, tutor implementers, and attendees program. In the collecting data, the techniques used observation, interviews, and documentation. Data were analyzed using data reduction, data presentation and conclusion/verification. The result of this research show that this program can improve social intelligence and creating civic participation in preventing and combating social problems that ultimately citizens building character and personality to have responsibility in social life.

Keywords: civic virtue, peace education, Peace Generation.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara multikultural, hal tersebut dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Ketidakmampuan mengelola keberagaman ini dapat mendorong terjadinya permasalahan sosial seperti kerusuhan, kekerasan dan tawuran, konflik antar suku, ras dan agama, intoleransi dan pelanggaran HAM, sebagai contoh kasus pelanggaran HAM, tercatat dari tanggal 1 Januari 1961 sampai 26 Nov 2015 dalam ranah kesetaraan dan non-diskriminasi 13 kasus, kebebasan beragama dan berkeyakinan 108 kasus, hak atas hidup 231 kasus dan perbudakan 5 kasus (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat : 2015), kemudian konflik yang terjadi antara warga Dayak dan Madura di sampit, Kalimantan Tengah, yang merupakan sebuah konflik antar etnis tercatat dengan jumlah korban tewas etnis Madura tercatat 315 orang (Mahmud, 2006), dan konflik yang terjadi di Aceh yang terjadi hampir selama 30 tahun tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, namun juga tanpa disadari telah mengubah karakter masyarakat Aceh yang cinta damai menjadi masyarakat cinta kekerasan Meiro dalam (Zuhri, 2009). Dalam kasus-kasus tersebut merupakan bentuk dari permasalahan sosial yang jauh dari nilai-nilai keadaban

kewarganegaraan dalam bidang sosial terjadi karena antar individu yang tidak bisa saling menghargai dan menghormati satu sama lain.

Berbagai program pemecahan persoalan sosial tersebut di atas yang dilakukan pemerintah menjadi tidak efektif karena terpusat pada pemerintah (*top-down*) tanpa mengikutsertakan aspirasi dan partisipasi masyarakat, padahal program persolaan sosial hanya bisa berjalan optimal jika didukung oleh pendekatan dari bawah (*bottom up*) dalam bentuk gerakan sosial (Certoma & Notteboom, 2015). Komunitas *Peace Generation* menjalankan program pendidikan damai sebagai respon warga negara terhadap permasalahan sosial dan fungsi gerakan sosial yang berasal dari bawah untuk menyebarkan virus perdamaian kepada masyarakat. Dalam level internasional, pendidikan digunakan sebagai pendekatan untuk mengurangi konflik dan kekerasan, seperti yang diungkapkan oleh (Blair : 2014) bahwa pendidikan sangatlah penting dalam menjaga perdamaian dunia . Hal tersebut sesungguhnya sudah menjadi wacana terutama pendidikan perdamaian, PBB melalui UNESCO dan UNICEF sudah menggunakan pendidikan perdamaian sebagai respon kemanusiaan paska konflik untuk mengembalikan kondisi masyarakat paska konflik lebih berperilaku kepada perdamaian. Pendidikan terutama pendidikan perdamaian juga dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengikis dan meminimalisir gerakan ekstrimisme yang sekarang ini merambah ke kaum pemuda dan pemudi yang tidak memiliki pendidikan yang cukup tentang toleransi dan saling menghormati. Sesuai dengan dimensi pendidikan damai tersebut yaitu pendidikan demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan (Fitsduff & Isabella, 2011).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di tiga lokasi, yaitu di SMK Profita Bandung, SMK Pasundan 4 Bandung dan SMK Perjuangan Parongpong. Informan penelitian terdiri dari pengurus komunitas *Peace Generation*, tutor pelaksana program pendidikan damai dan peserta program pendidikan damai. Hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan model Milles dan Huberman. Teknis analisis tersebut terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (Milles & Huberman, 2012). Data yang berhasil diperoleh kemudian divalidasi menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data.

Hasil Penelitian

Konsep Program Pendidikan Damai (Peace Education)

Program pendidikan damai yang dilakukan oleh komunitas *Peace Generation* bertujuan untuk menyebarkan virus perdamaian kepada generasi muda dengan melatih guru mengajar pendidikan damai untuk dijadikan tutor atau *agent of peace* yang kemudian akan dilaksanakan baik di lingkungan pendidikan, lingkungan sosial (panti asuhan) ataupun lingkungan keagamaan (pondok pesantren), berbeda dengan tujuan pendidikan damai yang dilaksanakan di wilayah konflik seperti Palestina dan Lebanon terintegrasi dengan kurikulum PKn dengan isi tujuan penyelesaian konflik melalui mediasi (Shuayb, Maha, 2015).

Materi pendidikan damai tersebut adalah 12 nilai dasar perdamaian yaitu : (1) menerima diri, (2) prasangka, (3) sukuisme, (4) perbedaan agama, (5) perbedaan jenis kelamin, (6) perbedaan status ekonomi, (7) perbedaan kelompok atau geng, (8) memahami keragaman, (9) memahami konflik, (10) menolak kekerasan, (11) mengakui kesalahan, dan (12) memberi maaf (Amalee & Lincoln, 2016), materi tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan damai yaitu untuk menciptakan seseorang yang dapat menerima diri sendiri dan orang lain (keberagaman), memiliki empati dan memiliki sifat anti kekerasan. (Pate, Umaru A. & Dauda, Sharafa, 2015).

Proses pembelajaran pendidikan damai dilakukan melalui enam tahap. *Pertama*, pendahuluan (tinjauan ulang, kata kunci dan hikmah) siswa diberikan kata kunci dan kutipan kata mutiara ayat Al-quran atau hadist yang berkaitan dengan tema pembahasan. *Kedua*, (pemanasan) untuk membangun minat siswa terhadap tema yang akan dibahas, dengan cara siswa diajak melakukan permainan interaktif cerita, atau sharing yang isinya menyangkut tema yang akan dibahas. *Ketiga*, (inti pelajaran) yaitu poin-poin inti dari tema yang dibahas. *Keempat*, model dan praktek (*P-discussion dan Roleplay*) yaitu berisi cerita atau kisah teladan, baik dari sejarah maupun cerita kehidupan sehari-hari dengan melihat contoh atau model yang lebih konkret, diharapkan siswa memahamai setiap pesan pelajaran dan mampu mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. *Kelima*, evaluasi berupa kuis atau game untuk mengukur sejauh mana siswa dapat menyerap kegiatan pelajaran. *Keenam*, penugasan (PR) tugas yang bisa dikerjakan dengan melibatkan orang tua dan anggota keluarga, diharapkan pesan dari setiap pelajaran juga bisa dipahami oleh anggota keluarga yang terlibat dalam proses pengerjaan tugas ini.

Pembahasan

Tindakan sosial merupakan semua perilaku manusia ketika dan sejauh individu memberikan suatu makna subyektif terhadap perilaku tersebut dalam Weber dalam (Kristiyanto, 2014), jadi tindakan sosial mempunyai arti berdasarkan makna

subyektifnya yang diberikan oleh individu atau kelompok, tindakan itu mempertimbangkan perilaku orang lain dan karenanya diorientasikan dalam penampilannya, selanjutnya Weber menyatakan bahwa tindakan sosial dapat digolongkan menjadi empat kelompok (tipe) untuk menjelaskan makna tindakan yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya, yaitu tindakan rasional instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afektif. Komunitas *Peace Generation* yang terdiri dari individu-individu kemudian membentuk suatu kelompok yang memiliki tujuan bersama yaitu menyebarluaskan nilai-nilai perdamaian dilingkungan masyarakat dapat dipandang sebagai salah satu tindakan sosial untuk penanggulangan permasalahan sosial.

Tindakan rasional instrumental dapat dilihat dari terciptanya komunitas *Peace Generation* ini yang bertujuan untuk menyebar virus perdamaian sebagai tindakan preventif permasalahan sosial. Tindakan rasional berorientasi nilai dapat dilihat dari tujuan setiap program yang dilakukan oleh komunitas *Peace Generation* dalam mengajarkan nilai-nilai dasar perdamaian yang mengedepankan aspek perubahan sikap dari pada pengetahuan. Tindakan tradisional dapat dilihat dari pola edukasi dalam program pendidikan damai yang dilakukan di sekolah-sekolah dan Tindakan afektif dapat dilihat dari kesediaan *agent of peace* atau tutor pelaksana program pendidikan damai tanpa mengharap imbalan.

Mills mengatakan masalah sosial merupakan bentuk disorganisasi sosial, pendekataan dalam pemecahan masalah tersebut dapat dilakukan melalui jalur politik maupun non politik kekuasaan (Brewer, 2004). Jalur politik disini merupakan pemecahan masalah yang dilakukan melalui struktur kekuasaan dalam pemerintahan, penyelesaian masalah sosial tersebut tidak hanya diselesaikan lewat jalur struktural namun juga nonstruktural melalui upaya-upaya yang dilakukan perorangan maupun kelompok sosial. Dalam hal ini, program pendidikan damai (*peace education*) yang dilakukan oleh komunitas *Peace Generation* menjadi bagian dalam intervensi nonstruktural bagi penyelesaian masalah-masalah sosial. Intervensi yang dilakukan oleh komunitas *Peace Generation* dengan program ini yaitu pembuatan kelompok sosial yang mengkampanyekan gerakan-gerakan kepedulian dalam kehidupan sosial kepada masyarakat luas. Komunitas ini melakukan gerakan dalam bidang sosial untuk menciptakan kehidupan sosial yang damai serta mengajak masyarakat umum lainnya guna turut peduli terhadap kondisi sosial di Kota Bandung. Pola pendekatan persuasif dengan pemberian wawasan nilai-nilai perdamaian mampu membawa penyegaran berpikir bagi masyarakat bahwa problem-problem sosial dapat diselesaikan secara bersama-sama melalui program ini.

Kelas-kelas masyarakat seperti manusia bebas dan budak, kaya dan miskin, tuan dan budak, penindas dan tertindas, hal tersebut merupakan kumpulan asas sosial yang menarik konflik masyarakat di dalamnya dan memberi kesan kepada perubahan substruktur ekonomi mereka. Mark dalam (Ismail & Basir, 2012).

Pendidikan damai (*peace education*) yang dilakukan oleh komunitas *Peace Generation* ini mencegah konflik terjadi karena perbedaan-perbedaan, hal itu dibuktikan dari beberapa materi yang diajarkan yaitu menerima diri sendiri, perbedaan agama, perbedaan jenis kelamin, perbedaan status ekonomi, perbedaan kelompok atau geng, dan memahami perbedaan.

Pendidikan damai yang diberlakukan baik di wilayah konflik atau non konflik bertujuan untuk pengembangan pendidikan, pendidikan perlucutan senjata, resolusi konflik, pendidikan lingkungan, dan pendidikan hak asasi manusia (Bajaj, M & Chiu B, 2009). Program pendidikan damai (*peace education*) yang dilakukan oleh komunitas *Peace Generation* dapat pula menghindari adanya potensi sebagai masyarakat beresiko (*risk society*), masyarakat kota rawan menghadapi berbagai resiko akibat persoalan sosial seperti perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan status sosial dan perbedaan status ekonomi. Bentuk *risk society* yang dapat dihindari dengan penerapan program pendidikan damai adalah menanamkan nilai-nilai untuk bisa saling menerima perbedaan.

Potensi hadirnya masyarakat beresiko (*risk society*) juga mengharuskan pelaksana program ini untuk membangun kesadaran sebagai masyarakat berisiko. Kesadaran tersebut diwujudkan sebagai *manufactured risk* yaitu keterlibatan manusia dalam memproduksi, mencegah, dan menanggulangi resiko. *Manufactured risk* adalah respon terhadap distribusi resiko pada masyarakat modern melalui pengembangan *early warning system* atau sistem tanggap resiko bagi perkembangan sosial dan ekologi (Effendi, 2012). Pendidikan damai (*peace education*) dalam konteks masyarakat beresiko dapat diharapkan sebagai *manufactured risk* yang tidak hanya menjadi solusi bagi pemecahan permasalahan sosial tetapi juga upaya preventif. Upaya preventif dalam program ini berupa mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan pencegahan konflik (Ebeye, Nworie, Ukponu & Linda Nneamaka, 2014). Komunitas *Peace Generation* ini menyadari perubahan sosial di Kota Bandung sehingga mereka menjalankan program ini berkeinginan ada perubahan permasalahan sosial kearah perdamaian. Para pegiat adalah orang-orang yang sadar pentingnya nilai-nilai perdamaian untuk kehidupan sosial sehari-hari. Melalui program ini, nampak adanya sistem tanggap resiko (*early warning system*) di mana suatu daerah terdapat gerakan kooperatif bagi upaya penanggulangan permasalahan sosial yang semakin meningkatkan daya dukung kehidupan sosial bagi kehidupan di kota. Keberhasilan program ini sebagai *early warning system* karena para warga tidak lagi mengalami persoalan sosial seperti kerusuhan, konflik antar ras, suku dan agama, intoleransi dan pelanggaran HAM

Kesadaran warga negara dalam membangun *early warning system* melalui program pendidikan damai memperlihatkan adanya peningkatan keadaban kewarganegaraan. Keadaban kewarganegaraan (*civic virtue*) secara konseptual paradigmatis digambarkan sebagai gabungan dari kepercayaan diri

kewarganegaraan (*civic confidence*), kecakapan kewarganegaraan (*civic competence*) dan komitmen kewarganegaraan (*civic committment*). Kepercayaan diri kewarganegaraan (*civic confidence*) dihasilkan dari sinergi pengetahuan atau *civic knowledge* dengan sikap kewarganegaraan atau *civic disposition* (Winataputra, 2015). Pengetahuan warga negara (*civic knowledge*) dalam program ini berawal dari pola edukasi yang diberikan oleh komunitas *Peace Generation* selama pelaksanaan program *training* guru pendidikan damai berlangsung. Pengetahuan ini kemudian bertemu dengan motif para guru (*agent of peace*) yang menginginkan adanya gerakan pencegahan permasalahan sosial di sekolahnya. Hal ini menandai adanya sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) yang luhur berupa kesadaran akan permasalahan sosial dengan kemauan menjalankan program tersebut.

Kecakapan kewarganegaraan (*civic competence*) merupakan perpaduan dari pengetahuan kewarganegaraan atau *civic knowledge* dengan keterampilan kewarganegaraan atau *civic skills* (Winataputra, 2015). Kecakapan ini mulai terlihat ketika *agent of peace* mengembangkan model pembelajaran pendidikan damai yang lebih efektif dan menyenangkan, kecakapan juga terlihat pada komunitas yang semakin mengembangkan model pendidikan damai dalam bentuk lain.

Komitmen kewarganegaraan (*civic committment*) yaitu gabungan dari sikap kewarganegaraan atau *civic dispositions* dengan keterampilan kewarganegaraan atau *civic skills* (Winataputra, 2015). Komitmen warga negara dalam menjalankan program pendidikan damai (*peace education*) dapat dilihat dari keteguhan komunitas *Peace Generation* dalam menyebarkan program ini, karena salah satu cara menumbuhkan keadaban kewarganegaraan dapat dilakukan melalui komunitas (Meiring, Piet G J, 2003). Sejak 2006 telah banyak kegiatan yang dilakukan baik secara internal maupun melibatkan masyarakat Kota Bandung guna menyebarkan virus perdamaian. Komitmen ini tidak dapat terlepas dari sikap pengurus dan anggota komunitas untuk terus belajar dan menjalin kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat guna meningkatkan keterampilan. Hal ini sangat penting guna dijalankan karena keberhasilan program ini sangat ditentukan tidak hanya oleh minat tetapi juga keterampilan pegiatnya. Program *training* guru pendidikan damai dan *talk the peace* yang dilakukan oleh komunitas *Peace Generation* adalah upaya yang memperlihatkan tingginya perhatian terhadap peningkatan *skill agent of peace* (tutor) serta sikap kepedulian anggota untuk mengajak warga Kota Bandung lebih peduli kepada kondisi sosial.

Dari pembahasan di atas, maka program pendidikan damai (*peace education*) yang diterapkan oleh komunitas *Peace Generation* terbukti dapat meningkatkan keadaban kewarganegaraan (*civic virtue*) dalam bidang sosial. *Civic virtue* sebagai konsep nilai yang melekat pada perseorangan atau kehidupan privat menjadi tujuan yang sebenarnya dari pendidikan damai (*peace education*) melalui pengembangan pengetahuan, pemahaman, intelektualitas, dan partisipasi yang dibutuhkan bagi

kompetensi dan tanggung jawab warga negara (McClain, 2001). Pengembangan keadaban kewarganegaraan dalam program ini dijalankan lewat upaya pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat yang turut meningkatkan kecerdasan sosial (*social knowledge and skill*). Peningkatan kedua kompetensi warga negara ini membantu mereka dalam mengupayakan tindakan partisipatif melalui program ini untuk mencegah permasalahan sosial. Dari sini, warga negara akan terbina watak dan karakternya untuk memiliki tanggung jawab dalam kehidupan sosial, yaitu tidak melakukan kerusuhan, kekerasan dan tawuran, konflik dengan suku, ras dan agama lain, intoleransi dan melakukan pelanggaran HAM.

Simpulan

Program pendidikan damai (*peace education*) yang dilakukan oleh komunitas *Peace Generation* terbukti dapat meningkatkan keadaban kewarganegaraan (*civic virtue*) di bidang sosial. Pengembangan keadaban tersebut dijalankan lewat aksi rasional untuk mencegah permasalahan sosial. Program ini turut melembagakan nilai-nilai sosial ke warga negara sehingga mereka memiliki kesadaran atas resiko dari setiap Permasalahan sosial. Pendidikan damai dalam program ini ialah pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan kepada warga negara sehingga meningkatkan kecerdasan sosialnya dan program pendidikan damai ini untuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam mencegah dan menanggulangi permasalahan sosial yang pada akhirnya warga negara terbina watak dan karakternya untuk memiliki tanggung jawab dalam kehidupan sosial yaitu tidak melakukan kerusuhan, kekerasan dan tawuran, konflik dengan suku, ras dan agama lain, intoleransi dan melakukan pelanggaran HAM.

Daftar Rujukan

- Amalee & Lincoln. (2016). 12 Nilai Dasar Pendidikan Perdamaian, Bandung : Mizan.
- Bajaj, M & Chiu B, (2009), Education for Sustainable Development as Peace Education. *Peace & Change*, Vol. 34, No. 4, hlm 441-455
- Blair, Tony. (2014) "Education is a Security Issue", *The Jakarta Post*.
- Brewer, John D. (2004), Imagining The Sociological Imagination: the biographical context of a sociological classic, *British Journal of Sociology*, vol. 55, hlm. 317-333.
- Certoma, C., dan Notteboom, B. (2015). Informal planning in a transactive governmentality: Re-reading planning practices through Ghent's community gardens. *Planning Theory*, hlm. 1-24.

- Ebeye, Nworie, Ukponu & Linda Nneamaka, (2014), Utilization of Peace Education in Adult Literacy Programmes in Anambra State for Conflict Resolution and National Security. *An International Multidisciplinary Journal, Ethiopia* Vol. 8(4), hlm 166-182.
- Effendi, R. (2012). Isi dan modus pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana peningkatan keadaban masyarakat resiko (risk society). (Disertasi). Sekolah Pascasarjana UPI, Bandung.
- Fitzduff, Mari & Isabella Jean (2011) *Peace Education: State of the field and Lessons Learned from USIP Grantmaking*.
- Fountain, Susan (1999) *Peace Education in UNICEF, UNICEF*.
<http://dokumentasi.lembagastudidanadvokasimasyarakat.or.id/reports/>
- Ismail, Indriaty & Basir, Mohd Zuhaili Kamal, (2012), Karl Marx dan Konsep Perjuangan Kelas Sosial, *International Journal of Islamic Thought*, Vol. 1, hlm 27-33
- Kristiyanto, Yunas, (2014), Tindakan Sosial Pemuka Agama Islam Terhadap Komunitas Punk : (Studi Deskriptif Mengenai Tindakan Sosial Pemuka Agama Islam Terhadap Komunitas Punk di Desa Bareng, kabupaten Jombang, Jawa Timur). *Jurnal Sosial dan Politik Komunitas*, Vol. 3 No. 2, hlm 1-18.
- Mahmud, Choiril, (2006) *Pendidikan Multikultur*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- McClain, L. C. (2001). The Domain of Civic Virtue in a Good Society: Families, Schools, and Sex Equality. *Fordham Law Review*, V. 69 No. 5, Hlm. 1617-1666.
- Meiring, Piet G J, (2003) Moral regeneration: Seedbeds for civic virtue, *HTS* Vol. 59 No. 4, hlm 1223- 1238.
- Miles, M. B., dan Huberman, A. M. (2012). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Pate, Umaru A. & Dauda, Sharafa, (2015), Cross Cultural Communications, Peace Education and Development in Nigeria, *The Online Journal of Communication and Media*, Vol 1 No 1, hlm. 11-16.
- Shuayb, Maha, (2015), Human rights and peace education in the Lebanese civics textbooks. *Research in Comparative & International Education*, Sage, hlm 1-16.
- Winataputra, U. S. (2015). Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PKn) untuk generasi emas Indonesia : Rekonstruksi capaian pembelajaran. Dalam Sapriya (Penyunting). *Prosiding Seminar Nasional Penguatan Komitmen Akademik dalam Memperkokoh Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan* (hlm. 1-23). Bandung: Laboratorium PKn FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia.

Zuhri, Ahmad Minan (2010). Pendidikan Damai (*Peace Education*) dalam Islam. Skripsi pada Jurusan Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta : tidak diterbitkan.